

Pancakunci Pemugaran Manusia Indonesia

Memugar Mutu Manusia

Oleh: SUDJOKO

MENYIDIK Undang-Undang Dasar kita, apalagi penjasannya, tak mudah kita temukan tegang tentang manusia sebagai pribadi. Sebutan "rakyat" memang banyak, tapi agaknya kita tak cenderung mempribadikannya. Beberapa kali tercantum "tiap-tiap warga negara" untuk menyebutkan beberapa haknya, bukan kewajibannya. Satu-satunya sebutan "orang seorang" kita baca dalam Penjelasan atas pasal 33, dan hanya dalam hubungan dengan perekonomian, itupun dalam arti kurang baik: "Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang". Mengenal "perseorangan", nada kita ingkar pula. "Apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, Undang-Undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek". Yang lebih manis bagi kita ialah istilah "kekeluargaan", dan kemudian "rakyat".

Satu-satunya "orang" yang diperinci hak dan kewajibannya ialah Kepala Negara. Setelah itu ada beberapa catatan mengenai menteri negara. Lalu bagaimana tentang "orang" yang menjadi anggota MPR, DPA dan DPR? Bagaimana tentang "orang" yang menjadi pemimpin daerah dan pejabat? Dan karena negara ini negara hukum, bagaimana tentang orang yang namanya hakim? Begitulah seterusnya. Kita boleh simak pula GBHN. Maka secara keseluruhan bolehlah kita berkesimpulan bahwa kita ini kurang punya selera untuk menyoroti manusia sebagai perorangan. Mendadak kita sadar bahwa memusatkan perhatian kepada pucuk pimpinan negara ialah cermin dari budaya kita yang turun-temurun. Kita memang mempunyai gambaran tentang negara yang berdaulat, dan tentang kedaulatan rakyat. Tapi kita tak punya istilah "manusia berdaulat" atau "kedaulatan manusia"; "pribadi berdaulat" atau "kedaulatan pribadi". Akal kita rupanya tak pernah sampai ke situ. Atau barangkali pernah juga, cuma yang dilihat ialah momok "individualisme". Kalau begitu, kata-kata seperti 'aku', 'saya' dan 'diri' kita lihat sebagai sekawanan hantu saja. Lalu apa gunanya mempunyai 'kepribadian'. Ganti saja dengan 'kekamian' dan 'kekitaan' dan 'kegerombolan' dan 'kekeluargaan'.

DALAM film dan sandiwara Indonesia terlalu amat sering kita mendengar "diam!" "tutup mulut!" "jangan banyak bicara!" "ah,

perempuan cerewet!" "jadi kau membantah orang tua?" Semua itu terlontar dari mulut 'orang baik-baik'. Dalam film Barat, yang demikian itu biasanya hanya diucapkan orang kasar, bengis, dan bajingan tengik.

Pada kita, memenggal perkataan orang secara tadi adalah pantas dan sejalan dengan adat. Dengan demikian sang 'aku' juga terpenggal. Dia tidak dapat mengembangkan pikiran dan pendapatnya. Lidah tergalang. Dan 'aku' terbantut. Dalam tayangan, gaya penggal ini memamerkan kesontokan akal pengarang pocapan (dialogue). Dia tidak mampu bernalar tuntas. Dan penonton? Jadinya ya begitu juga.

Dalam pocapan seperti ini, hanya satu 'aku' yang masuk hitungan. Yakni akunya pemenggal, yang mau menang sendiri, menang tanpa persilatan, dan menang karena adat memberinya hak untuk menang.

Sungguhpun hardikan semacam tadi tidak terucap, hambatan terhadap pemekar 'aku' tetap terasa kuat oleh sebagian besar masyarakat kita. Dalam tiap lakon ketoprak hambatan itu dicipta oleh suara garau dan getas, oleh belak mata, dan oleh sikap-laku adikara. Dan kalau pun semua ini tidak ada - seperti dalam pergaulan masakin - kekang 'aku' ini tetap bekerja.

Kekang yang tegang galibnya diatasi dengan sikap tunduk, sebolehnya sambil tersungkuk-sungkuk. Kalau sudah begitu, bukan keakuan yang utama, tapi keselamatan. Agar selamat, aku boleh ingkar-aku. Apa boleh buat. Sebab apalah aku ini. Meludah ke langit, muka jua yang basah. Paling selamat, kalau aku lemah ini jadi kepanjangan AKU kuat. "Ke mana kelok lilin, ke sana kelok loyang", kata pepatah. Kalau disingkat, ini namanya ABS, Asal..... Senang. Maka banyak aku kecil ini ikut menikmati status bebas hukum, yang oleh para leluhur dikatakan "mencancang tidak memampas, membunuh tidak membangun".

Dalam bentuk lain, aku-aku pengejar selamat ini bila di sekolah cenderung memilih diam dari pada bertanya, apalagi menyatakan pendapat. Pegangannya, "malu bertanya, selamat di jalan". Sangkanya begitu. Dan bagaimana di otak? Pertanyaan ini sudah tak penting lagi: Tapi otak telur membuat orang diam juga, bukan saja di sekolah, tapi juga di ruang bincang dan ceramah. Belum lagi di ruang simposium dengan utusan-utusan dari berbagai negara asing. Terseok kata melulu "delegasi" kita itu.

Masih banyak lagi penampilan

sang aku mati kutu ini. Kalau misalnya keadaan brengsek - baik dirinya maupun negaranya - dia gemar menuding, lalu memintaminta. Buruk muka, cermin dibelah. Dan makin bergantung dia kepada belas kasihan dan bantuan dan sumbangan. Jangan sangka dia ini makan kerawat, dan menduduk sepanjang jalan. Aku modern ini sering nampak berkecukupan, mengaku terpelajar, mengangkat diri sebagai teladan atau pelopor bangsa, dan kalau tidak sesekali mendangi bagaikan pejuang, dia melulung tangan yang dipertuan agung. Dia tidak memutar-balik uang sekeping, tapi bermain dengan harta jutaan.

Ada baiknya para ahli ilmu jiwa memberberkan segala rona aku-aku ini.

Memugar mutu manusia Indonesia ialah membuat bangsa benar - benar berdaulat bangsa demikian terdiri dari manusia - manusia berdaulat. Kedaulatan bangsa yang sejati ialah kedaulatan tiap warganya. Maka ada beberapa kunci tolok yang dapat dipakai untuk mengangkat mutu manusia. Kita tahu bahwa kunci tolok itu, atau masterkey, dapat membuka banyak pintu.

1. **Bhinneka Tunggal Ika** - Ini bukan sekedar kunci tolok, tapi benar-benar kunci wasiat. Namun, sungguhpun dia ini Lambang Negara, dia hilang tak tentu rimbanya. Dalam UUD tak ada, dalam Penjelasan UUD tak ada, dalam Ekaprasetia Pancakarsa nyaris minguap, dan dalam GBHN, silakan cari. Lambang ngambang yang dileceh orang, itulah dia. Akhirnya dia hanya muncul sebagai "hiburan tetap" di kaca TV, yakni tontonan tarian dan nyanyian dan pakalan dan upacara nikah yang gemerlapan.

Hingga kini, yang mengelegar bertalu-talu ialah "persatuan", "kesatuan", "pemersatuan", "bersatu", pendeknya segalanya yang dipersatukan atau dianggap satu, sampai semua ini melanda bagaikan air bah. Perhatikan satu-satunya kalimat dalam Ekaprasetia Pancakarsa yang mencantumkan kunci wasiat ini: "Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan Bangsa". Yang disebut "dasar" ini terkurung oleh istilah-istilah yang serba "satu". Dan sungguhpun "penuh tarian dan nyanyian", GBHN tak sempat juga menyebut "Bhinneka Tunggal Ika" dalam pasal-pasal tentang kebudayaan.

Maka terus terang saja, kita ini sesungguhnya takut kepada apa yang namanya "Bhinneka" itu. Tersilau dan terpukau oleh yang

serba satu, kita tergelincir ke dalam pengkhianatan Lambang Negara kita sendiri. Dan akibatnya sudah lama terasa. Kita sudah mengidap penyakit "seragam", "monolith", "terpusat", "sentralisasi", "orientasi ke atas", dan macam-macam lagi yang senada. Karena digiring-giring ke arah "memperkokoh persatuan", manusia Indonesia malah menjadi terbelah jiwanya. Selain terbelah, juga terbelenggu.

Maka sudah waktunya kita memulihkan harkat Lambang kita bersama dan membangun kepercayaan kita kepada Bhinneka Tunggal Ika. Ini pertama-tama berarti meramalkan pemikiran dan pembicaraan mengenai kunci wasiat agung ini. Bersamaan itu disusun filsafat Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar filsafat budaya, yang kemudian melandasi budaya politik, pendidikan, bahasa, dan seterusnya. Nanti mau tak mau, atau dengan sendirinya, akan muncul sang manusia sebagai peran. Jadi bukan saja "rakyat", tapi juga manusia. Dalam masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, rakyat adalah 'manusia-manusia'.

2. Kepribadian - Dalam GBHN beberapa kali disebut "kepribadian bangsa". Siapa pula yang membuat istilah ini?

Pangkal kata 'kepribadian' ialah 'pribadi', dan menurut segala kamus, 'pribadi' ialah diri, sendiri, perseorangan, manusia sebagai perseorangan, diri manusia atau diri orang sendiri, **person, individual; personal, own, self.** (St. Moh. Zain, Poerwadarminta, Wjowasito). "Sorangan", kata kamus Sunda. Mengapa lantas ada istilah "kepribadian bangsa"? Ini bukan hanya penyalah-gunaan kata 'pribadi', tapi cenderung juga penyingkiran manusia sebagai pribadi. Perkara 'disiplin' saja dirumuskan sebagai "disiplin nasional", dan bukan disiplin pribadi. Nampaknya saja sepele. Tapi "nasional" itu bukan pribadi.

Maka terus terang saja, kita ini sesungguhnya takut kepada manusia sebagai pribadi. Tersilau dan terpukau oleh yang serba nasional, serba bangsa, dan serba rakyat, kita nanti bisa mere-mehkan pribadi-pribadi.

Janganlah manusia sebagai pribadi ini hanya mau kita soroti kalau kebetulan kita ini harus menguraikan Pancasila. Justru karena manusia itu sudah dijunjung tinggi dalam rumusan Pancasila, maka harkat manusia sebagai pribadi harus menggema dalam segala uraian lain. Tak benar kalau manusia diganti saja dengan "golongan", "masyarakat", "rakyat", "bangsa" dan "nasional", sambil menyebutkan "kepentingan pribadi" dan "kemakmuran orang-seorang" dengan gaya melecehkan.

Para perancang GBHN harus pandai menghargai manusia sebagai pribadi, dan pandai menjamin perkembangan dan keutuhannya. Kalau ini jelas, dan

dilaksanakan dengan baik, maka manusia Indonesia akan menjadi jauh lebih sehat. Sementara itu, justru sebagai Pancasila, kita berupaya untuk membangun "harga diri" yang sehat dalam diri tiap manusia, sehingga dia benar-benar "tidak memalukan", dan benar-benar pantas dihargai.

3. Mandiri - Ini sesungguhnya salah satu tiang seri, atau sokoguru, dari kepribadian yang sehat dan "tidak memalukan". Langkanya kemandirian ialah sumber dari segala rupa penyakit: kepasrahan, ketergantungan, kecengungan, kesusahan, pengangguran, dan seterusnya. Prakarsa tidak terbit dari orang yang tidak mandiri. Korupsi dan pungli ialah jalan hidup orang yang berjiwa benalu. "Pemuda bayaran" yang minta segala rupa kemudahan sebagai syarat "berjuang" ialah pemuda tanpa kemandirian. Langkanya pengusaha tangguh ialah cermin dari langkanya kemandirian.

Pada anak kecil kemandirian sudah bisa ditanamkan. Beban Pemerintah akan jauh lebih ringan kalau kemandirian tiap warga Indonesia kuat. Tapi ini rupanya kurang disadari. Pemerintah lebih bangga mempertontonkan rakyat yang "mendapat bantuan Pemerintah". Bahkan hanya rakyat macam inilah yang nampak dalam siaran 'Dari Desa ke Desa' TVRI. Tak pelak tiap pedusun diminta "mengucapkan terima kasih". Apalagi tontonan TV menjelang Pemilu yang lalu.

4. Tenggang Rasa - Kunci wasiat ini jauh lebih bahari dari Bhinneka Tunggal Ika, bahkan sudah dirumuskan sekurang-kurangnya 2.500 tahun yang lalu. Sebutan lain ialah 'tenggang-menenggang' dan 'tepa slira'.

Tepa slira berarti 'mengukurkan pada badan sendiri'. Memang menjelaskannya tak begitu mudah. Barangkali rumusan berikut ini dapat membantu: "Perlakuanmu terhadap orang, hendaknya boleh juga diperlakukan terhadap dirimu sendiri. Apa yang tidak boleh orang perlakukan terhadap dirimu, janganlah kauperlakukan terhadap orang".

Terang bahwa ini kunci wasiat bagi pergaulan hidup. Terang bahwa di sini dituntut tanggung jawab pribadi. Dengan tenggang rasa, banyak sekali "penyakit" yang menimpa kita sekarang ini bakal sembuh.

Terang pula bahwa penangkal individualisme rakus itu bukan pelecehan pribadi, tapi tenggang rasa. Yang pertama-tama diperlukan hanyalah contoh-bukti tenggang rasa dari pihak segala "orang kuat" serta pemimpin rakyat, sebab pengaruhnya bisa luas. Namun tiap orang bisa mulai membiasakannya sekarang juga, termasuk anak-anak kita.

5. Rame ing Gawe - Gawe ialah gawai, atau kerja. Kamus Indonesia malas menjelaskannya. Maka lebih baik kita mengutip



DR. Sudjoko

kamus Sunda: "ngagunakeun atanapi ngagerakkeun anggahota (pangpangna leungeun) bari mikir pikeun ngawujudkeun barang nu mangpaat".

Selain "ngawujudkeun barang", tentu juga menjalankan segala gunakarya lain. "Nu mangpaat", yang berguna, bukanlah yang asal-asalan, lalu mengingkari tepa slira. "Melekatkan kersik ke buluh" pun tak berguna. Misalnya, bila cuma pintar omong melulu.

Arti 'rame', atau ramai, menurut Poerwadarminta, ada lima macam. Antara lain, "riang gembira", dan "serba giat (sibuk dsb.)".

Maka 'Rame ing Gawe' bukanlah berkarya dengan rasa terpaksa dan segan. Ini adalah gregat saut, kata orang Jawa, bekerja dengan semangat penuh. Yang dipuji leluhur kita memang orang-orang yang "duduk meraut ranjau, tegak meninjau jahar", yang "habis kapak berganti belung". Kerja pun harus bermutu sebaik-baiknya, atau sebagaimana kata orang dulu, "kalau menampi jangan tumpah padinya".

Orang dulu sangat mencela mereka yang "diam di bandar tak menru, diam di laut asin tidak", yang di tengah segala kesempatan dan kemudahan untuk maju ternyata tetap "santalsantai" saja alias malas. Padahal, di tengah segala kekurangan pun orang harus maju. "Tak air talang dipancang. Tak kayu janjang dikeping. Tak emas bungkal diasah. Tak beras antah dikisik. Habis hulubalang bersiak". Nyata dari ratna-mutia ringkas tegas ini juga ajaran jangan pilih bulu dalam menanganai karyaguna.

Karena segala kekurangan di negara kita ini berangsur diatasi, maka sangatlah aib bahwa golongan yang berada di tengah segala perbaikan ini justru menguar-uarkan "hidup santai" tanpa malu. "Sepuluh jung masuk labuhan, anjing bercawat ekor juga", "sindir nenek moyang bangsa pelaut. Seribu buku masuk perpustakaan universitas, hasilnya tetap saja otak katung dan kepala udang.

Demikianlah sekedar pan-cakunci pemugaran manusia Indonesia.***